

BAB III

GAMBARAN UMUM DIREKTORAT PEMBINAAN SMK

3.1 Sejarah Pendidikan Kejuruan Indonesia

Sejarah pendidikan kejuruan di Indonesia dapat dibagi dalam dua masa, yaitu pendidikan pada zaman sebelum kemerdekaan dan pendidikan pada zaman kemerdekaan. Pendidikan kejuruan pada zaman sebelum kemerdekaan meliputi tiga periode, yaitu (1) periode pendidikan kejuruan berbasis keagamaan; (2) periode pendidikan kejuruan berbasis kepentingan penjajah; dan (3) periode pendidikan kejuruan dalam rangka perjuangan kemerdekaan.

Menurut Jalal & Supriadi (2001), Pendidikan kejuruan pada zaman kemerdekaan dapat dibagi ke dalam tiga babak : (1) tahun 1945 – 1968 yakni sejak proklamasi kemerdekaan hingga sebelum dilaksanakannya Pelita I; (2) sejak dimulainya Pelita I pada tahun 1969/1970 hingga akhir Pelita VI tahun 1997/1998; dan (3) periode reformasi sejak tahun 1998 yang berlanjut dengan dilaksanakannya otonomi daerah sejak tahun 2001 hingga sekarang tatkala pendidikan mengalami desentralisasi yang radikal (dikutip dalam Supriadi, D. (2002)).

3.1.1 Perkembangun Awal Pendidikan Kejuruan di Indonesia

Sekitar 10 abad sebelum datangnya bangsa Portugis dan Belanda, pendidikan di Indonesia berawal dari pendidikan berbasis keagamaan yang diselenggarakan oleh para pemuka dan penyebar agama Hindu, Buddha, dan Islam. Pada zamannya, mereka telah mengembangkan sistem pendidikan yang relatif "terstruktur" dari segi isi maupun tingkat tingkatnya. Namun sistem pendidikan dalam bentuk sekolah atau menyerupai sekolah sekarang baru dimulai pada

abad ke-16. Sekolah pertama di Indonesia didirikan oleh penguasa Portugis di Maluku, Altonio Galvano, pada tahun 1536 berupa sekolah seminari untuk anak-anak dari pemuka pribumi.

VOC mendirikan sekolah pertama di Ambon pada tahun 1607, disusul kemudian di Pulau Banda (1622), di Pulau Lontar (1623), dan di Pulau Roen (1627), semuanya di kawasan Maluku yang kaya akan rempah-rempah dan menjadi sasaran awal misi VOC. Sekolah-sekolah tersebut pada dasarnya bertujuan untuk penyebaran agama Kristen. Di luar wilayah Ambon, VOC mendirikan juga sekolah di Jakarta (1617) yang menjadi Sekolah Batavia (*Bataviaase School*) pada tahun 1622; Sekolah Warga Masyarakat (*Burgerschool*) tahun 1630, Sekolah Latin (*Latijnse School*) tahun 1642, dan Sekolah Cina (*Chineese School*) tahun 1737. Sekolah yang berorientasi "kejuruan" yang didirikan pertama kali pada zaman VOC adalah Akademi Pelayaran (*Academie der Marine*) pada tahun 1743 tetapi ditutup kembali pada tahun 1755.

Ketika kekuasaan VOC berakhir pada penghujung abad ke-18, pendirian sekolah-sekolah dilanjutkan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang didasarkan atas keturunan, bangsa, dan status sosial. Sekolah pertama untuk anak-anak Eropa dibuka di Jakarta pada 1817. Setelah lebih dari dua abad berkuasa sejak zaman VOC, baru pada tahun 1853 Belanda mendirikan sekolah kejuruan, yaitu *Ambachts School van Soerabaia* (Sekolah Pertukangan Surabaya) yang diperuntukkan bagi anak-anak Indo dan Belanda, disusul kemudian oleh sekolah serupa di Jakarta pada 1856. Kedua sekolah ini diselenggarakan oleh swasta. Baru pada tahun 1860, Pemerintah Hindia Belanda mengusahakan Sekolah Pertukangan di Surabaya untuk golongan Eropa.

3.1.2 Pendidikan Kejuruan Sejak Dimulainya Politik Etika (1901)

Menurut Leirissa (1985), pada tahun 1899 dalam majalah *De Gids* (No. 63) di Negeri Belanda dipublikasikan artikel berjudul "*Een Eereschuld*" (Hutang Kehormatan) yang ditulis oleh

Mr. C. Th. van Deventer. Tulisan ini mengungkapkan kerisauan kalangan intelektual Belanda terhadap pertumbuhan kapitalisme yang cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, khususnya di Hindia Belanda, sementara Belanda sendiri menyatakan dirinya sebagai bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi. Ia mengemukakan bahwa Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) tahun 1830 dan Sistem Liberal tahun 1870 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Belanda di tanah jajahannya, Hindia Belanda, merupakan politik pengerukan keuntungan yang luar biasa. Sampai dengan tahun 1899, menurut kalkulasi *van Deventer*, Pemerintah Belanda berutang pada Hindia Belanda sejumlah 187 juta gulden yang harus dibayar kembali kepada rakyat di tanah jajahannya itu dengan memberikan anggaran belanja tersendiri. Tulisan inilah yang kemudian memicu lahirnya Politik Etika (*Etische Politiek*) yang dicanangkan oleh Ratu Belanda dalam pidatonya di depan sidang parlemen Belanda tahun 1901 (dikutip dalam Supriadi, D. (2002)).

Sejak Politik Etika dicanangkan, Pemerintah Hindia Belanda memang memiliki anggaran sendiri yang sebagian digunakan untuk membangun pendidikan, termasuk pendidikan kejuruan. Di samping itu, mereka juga menunjukkan kesungguhannya untuk menyediakan pendidikan yang lebih dapat memenuhi kebutuhan orang-orang Bumiputera, bukan lagi semata-mata untuk kepentingan orang-orang Eropa yang tinggal di Hindia Belanda.

Mendahului dicanangkannya Politik Etika, mulai tahun 1900 sebenarnya Pemerintah Belanda telah menunjukkan kehendaknya untuk mengubah arah pendidikan di Hindia Belanda yang elitis dan segregatif pada abad ke-18 dan ke-19 ke arah pendidikan yang lebih *populis* dan *egaliter*. Lembaga pendidikan yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi orang-orang Eropa dan orang-orang Cina mulai dibuka untuk orang-orang Bumiputera, meskipun masih terbatas pada kalangan tertentu khususnya kaum priyai. Begitu juga tanggung jawab pengelolaan lembaga

pendidikan yang sebelumnya mengandalkan prakarsa swasta Belanda dan Cina mulai diambil alih oleh pemerintah. Hal ini terjadi pula pada pendidikan kejuruan.

Tabel 3.1
Jumlah Sekolah, Siswa, dan Guru Sekolah Kejuruan (1940)

| Sekolah | Lembaga | Siswa (S) | Guru (G) | Ratio S/G |
|------------------------|---------|-----------|----------|-----------|
| 1. Technise School | 7 | 1.708 | 98 | 17 |
| 2. Ambachts School | 36 | 5.414 | 355 | 15 |
| 3. Handel School | 21 | 1.307 | 55 | 24 |
| 4. Nijverheids School | 4 | 772 | 43 | 18 |
| 5. Landbouw School | 6 | 1.040 | -- | -- |
| 6. Middelbare Technise | 2 | 1.285 | 77 | 17 |
| 7. Middelbare Handel | 4 | 461 | 13 | 35 |
| 8. Middelbare Meisjes | 1 | 250 | 8 | 31 |
| 9. Kweek School | 4 | 855 | 21 | 41 |
| 10. Middelbare Kweek | 3 | 138 | 48 | 3 |
| Jumlah | 88 | 13.230 | 718* | 17' |

Sumber: Sejarah Pendidikan Teknik dan Kejuruan Di Indonesia (Supriadi, D. 2002).

Sebagai akibat dari Politik Etika, sampai dengan tahun 1940 perkembangan jumlah lembaga, siswa, dan guru sekolah kejuruan, termasuk kejuruan bidang keguruan, mengalami kemajuan. Misalnya, pada tahun 1940, jumlah siswa sekolah kejuruan meningkat 3,8 kali lipat menjadi 13.230 dan komposisi siswanya pun lebih berimbang antara siswa keturunan Eropa, Timur Asing dan Bumiputera.

Pada tabel 3.1 di atas tampak pula rasio guru dan siswa di sekolah-sekolah kejuruan pada saat itu yang merentang dari 1: 3 hingga 1: 41 tergantung jenis kejuruan yang diajarkannya, dengan rata-rata 1 guru menangani 17 siswa. Rasio ini cukup baik yang menunjukkan kesungguhan pendidikan kejuruan pada saat itu untuk menjaga mutunya.

3.1.3 Dari Zaman Kemerdekaan Hingga Era Reformasi

Secara historis, pendidikan kejuruan di Indonesia memang berakar pada zaman penjajahan Belanda. Oleh sebab itu, upaya untuk memahami sejarah pendidikan kejuruan semestinya merujuk pada perkembangan pada zaman Belanda tersebut. Akan tetapi, dalam pengamatan Oejeng Soewargana (1969) terjadi penyimpangan dari konsep pendidikan kejuruan yang berlaku di Belanda dengan apa yang kemudian diadopsi dan dikembangkan di Indonesia oleh Belanda sendiri yang dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut dia, pendidikan kejuruan yang berkembang di Indonesia adalah apa yang di Negeri Belanda disebut "*Beroepsonder-wijs*" yang dilaksanakan di sekolah oleh pemerintah, padahal yang lebih sesuai dengan kebutuhan Indonesia adalah "*Beroeps-en Vakopleidingen*" yang di Jerman dinamakan "*Beroeps-und Fachschule*" dan di Inggris disebut "*Vocational Education*". Pada awalnya, tipe yang disebut kedua itu merupakan kelanjutan dan tradisi "*gildewezen*" (Belanda), "*guild system*" (Inggris) atau "*Zunft-wesen*" (Jerman) yang dilaksanakan atas prakarsa swasta yang tergabung dalam perhimpunan para pengusaha yang disebut "*Bedrijfsgroepen*" (Belanda), "*Traders Union*" (Inggris), atau "*Wirtschaftsgruppen*" (Jerman). Soewargana (1969: 39) menulis:

Yang dahulu dibawa oleh Pemerintah Hindia Belanda ke Indonesia itu hanya "*Broepsonderwijs*" yang di Nederland diselenggarakan oleh Mm. OK & W saja (di Indonesia dahulu oleh Dep. O & E), sehingga dengan demikian timbullah pengertian keliru seolah-olah "pendidikan kejuruan" itu hanya meliputi "*schooltypen*" yang dahulu di zaman kolonial Belanda diadakan oleh Dept. O & E saja. (dikutip dalam Supriadi, D. (2002))

Tekad pemerintah untuk membangun pendidikan kejuruan ditunjukkan sejak Pelita I yang berlanjut hingga akhir Pelita VI, dibuktikan dengan investasi besar-besaran untuk membangun sekolah-sekolah baru, merehabilitasi dan meningkatkan sekolah-sekolah yang telah ada,

mengadakan peralatan praktik, membangun PPPG, meningkatkan mutu guru, dan banyak lagi. Di samping didukung dengan dana dari APBN, sumber pendanaan untuk membangun pendidikan kejuruan juga diperoleh melalui kerjasama luar negeri secara multilateral termasuk dengan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, ADB dan IDB, serta bilateral (G to G, Government to Government), baik dalam bentuk pinjaman (*loan*) maupun hibah (*grant*).

Pada akhir Pelita I dan menjelang dimulainya Pelita II, perhatian yang besar dari pemerintah terhadap pendidikan kejuruan dimungkinkan oleh meningkatnya ketersediaan dana sebagai akibat melonjaknya harga minyak secara dramatis, menyusul pecahnya perang Arab-Israel tahun 1973 yang dikenal dengan "*Yom Kipur*", diawali dengan serangan kilat pasukan Mesir atas Israel untuk merebut kembali Gurun Sinai.

Di tahun 1974 departemen tersebut (Dep. P & K) tiba-tiba mendapatkan kenaikan anggaran belanja, setidaknya untuk sementara. Ketika anggaran untuk tahun fiskal 1974/1975 tahun pertama Pelita II, 1974-1978 sedang disusun, terjadi kenaikan harga minyak mentah Indonesia dari US\$ 2,93 per barrel pada bulan April 1973 menjadi US\$ 10,80 di bulan Januari 1974. Akibatnya, RAPBN tahun 1974/1975 naik sampai dua setengah kali anggaran tahun 1973-1974. Harga minyak bumi masih terus menaik sampai US\$ 11,70 per barrel pada bulan April 1974 dan US\$ 12,60 pada bulan Juli tahun itu juga, sehingga jumlah dana yang tersedia cukup besar untuk melaksanakan program-program pembangunan yang telah ditentukan. Sejak tahun 1972, pemerintah sudah mengemukakan niatnya untuk meningkatkan titik berat pembangunan sosial dalam Pelita II, dan rezeki minyak telah memungkinkan dilaksanakannya niat itu lebih cepat dari dugaan semula. Pada Pelita I (1968-1973), anggaran pembangunan untuk Departemen P & K adalah Rp 36,6 milyar atau 3,4% dari seluruh anggaran pembangunan pemerintah. Pada Pelita II pos tersebut menjadi Rp 436 milyar berarti naik 12 kali atau sebesar 9% (dari RAPBN).

Ini berarti meningkatnya anggaran belanja Departemen P & K, bahkan lebih dramatis dari kisah kenaikan kenaikan harga minyak bumi. (Catatan: US\$ = Rp 378 tahun 1971, kemudian menjadi Rp 415).

Selama Pelita VI terjadi berbagai perubahan mendasar dalam pengelolaan pendidikan kejuruan. Dapat dikatakan bahwa pendidikan kejuruan mendapat tempat yang sangat baik dalam berbagai kebijakan dan program pendidikan ketika itu, yang boleh dikatakan belum pernah diperoleh sebelumnya. Pendidikan kejuruan diangkat setinggi-tingginya, bahkan cenderung "dimanjakan" (mungkin lebih tepat, "diprioritaskan"), oleh pimpinan Depdikbud dan menjadi andalan dalam mengimplementasikan kebijakan "*Link & Match*" yang terutama dilakukan melalui PSG. Hal ini sesuai dengan tujuan kelembagaan SMK yang menurut UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, "mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional".

Momentum pertumbuhan kuantitatif pendidikan kejuruan tersebut mulai dirasakan tersendat sejak dimulainya otonomi daerah tahun 2001, ditandai dengan makin sulitnya mendapatkan dana untuk pembangunan sekolah baru, rehabilitasi sekolah/peralatan yang ada, dan pengadaan peralatan baru. Sementara itu, kesungguhan dan kapasitas pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk melanjutkan ekspansi dan meningkatkan mutu pendidikan kejuruan diragukan karena mereka masih disibukkan oleh urusan-urusan jangka pendek dalam membenahi sistem yang ada dan membagi anggaran yang terbatas (itu pun sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum yang dialokasikan Pusat) untuk kegiatan rutin.

Perubahan lain yang perlu dicatat adalah dalam visi, misi, kebijakan dan program SMK saat ini telah sejalan dengan semangat reformasi, kemudian digagas perubahan yang revolusioner dalam menempatkan pendidikan kejuruan di tengah pendidikan dan pelatihan kejuruan. Gagasan

ke arah itu sesungguhnya telah dirintis pada periode sebelumnya dengan menghilangkan sekat yang begitu pekat antara apa yang disebut dengan "dunia sekolah" (*the world of school*) di satu pihak dengan "dunia kerja" (*the world of work*) di pihak lain.

Gambar 3.1
Perubahan Kebijakan Pendidikan Menengah Kejuruan

| | Kondisi Sebelumnya | | Arah Kebijakan |
|---|--|---|--|
| 1 | Sistem 'supply-driven' atas kebutuhan sosial masyarakat luas | → | Sistem 'demand-driven' yang dipandu kebutuhan pasar kerja |
| 2 | Sistem berbasis sekolah dengan pemberian ijazah bagi yang lulus ujian akhir | → | Sistem pendidikan dan pelatihan yang memberikan kompetensi sesuai dengan standar nasional yang baku |
| 3 | Sistem berbasis sekolah melalui alur dan proses yang kaku | → | Sistem pendidikan dan pelatihan yang lentur dengan prinsip multi entry dan multi exit |
| 4 | Tidak mengakui kemampuan yang telah dimiliki sebelum-nya | → | Sistem yang secara tegas mengakui kompetensi dimanapun dan bagaimana-pun caranya diperoleh. |
| 5 | Sistem berbasis sekolah dengan orientasi program studi. | → | Sistem pendidikan dan pelatihan yang mengacu pada profesi dan keterampilan kejuruan yang baku |
| 6 | Pendidikan dan pelatihan berfokus pada sektor formal | → | Pendidikan dan pelatihan untuk sektor formal maupun informal |
| 7 | Pemisahan antara pendidikan dan pelatihan | → | Mengintegrasikan secara terpadu antara pendidikan dan pelatihan yang bersifat kognitif dan berlandaskan ilmu pengetahuan |
| 8 | Sistem pengelolaan yang terpusat | → | Sistem pengelolaan yang terdesentralisasi |
| 9 | Lembaga/ organisasi yang sepenuhnya dibiayai dan dioperasikan oleh pemerintah pusat. | → | Lembaga/ organisasi yang mampu melakukan swakelola dan swadana dengan subsidi pemerintah pusat |

Sumber : Rencana Strategis Dit.PSMK 2005-2009, Direktorat Pembinaan SMK (2005)

Perkembangan kemudian menuntut reformasi lebih jauh lagi dengan membuka SMK seluas-luasnya untuk siapapun, kapanpun, dan di manapun. Namun ingin diberi catatan di sini bahwa gagasan yang baik tersebut perlu disertai kehati-hatian dalam pelaksanaannya untuk mencegah kemungkinan hilangnya jati diri SMK sebagai sebuah lembaga pendidikan

3.2 Budaya Kerja Direktorat Pembinaan SMK

Selalu komit terhadap pengembangan dan pembinaan SMK dengan mengutamakan layanan yang prima dan kerjasama yang baik melalui pengembangan kemampuan dan daya saing

direktorat dengan cara mengutamakan keharmonisan, sinergitas, jiwa profesionalisme, integritas dan loyalitas pegawai, sehingga dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan.

3.2.1 Visi dan Misi Direktorat Pembinaan SMK

Dalam memberikan pelayanannya Direktorat. Pembinaan SMK memiliki Visi sebagai berikut : *”Terwujudnya SMK bertaraf internasional, menghasilkan tamatan yang siap kerja-cerdas-kompetitif dan memiliki jati diri bangsa, mampu mengembangkan keunggulan lokal dan bersaing di pasar global. “*

Untuk merealisasikan visi yang telah dicanangkan Dit.PSMK mencanangkan misinya sebagai berikut :

- 1) *Meningkatkan Profesionalisme dan Good Governance SMK sebagai Pusat Pembudayaan Kompetensi*
- 2) *Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan*
- 3) *Membangun dan Memberdayakan SMK menuju sekolah bertaraf Internasional (SBI) untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja, cerdas, dan kompetitif di pasar Nasional dan Global dan memiliki jati diri bangsa.*
- 4) *Memberdayakan SMK untuk Mengembangkan Potensi Lokal dalam rangka menumbuhkan pendidikan yang relevan berbasis Keunggulan Lokal*
- 5) *Memberdayakan SMK untuk Mengembangkan Kerjasama dengan Industri dan Berbagai Lembaga Terkait Lainnya*
- 6) *Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Kejuruan yang Bermutu*

3.2.2 Tujuan Direktorat Pembinaan SMK

Secara garis besar tujuan Dit.PSMK terdiri atas tiga tujuan strategis yaitu :

- 1) Tujuan strategis I : Perluasan dan Pemerataan Akses dengan tetap memperhatikan mutu.

Tujuan Operasionalnya yaitu :

- Meningkatkan daya tampung SMK dengan mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta tenaga kependidikan
- Meningkatkan peran pemerintah daerah untuk membangun SMK
- Membangun SMK baru bekerja sama dengan pemerintah daerah
- Meningkatkan peran serta masyarakat berpartisipasi membuka SMK yang memenuhi standar nasional pendidikan
- Mengembangkan layanan khusus SMK
- Mengusahakan model alternatif penyelenggaraan SMK

- 2) Tujuan II : Mengembangkan Mutu dan Relevansi SMK dan Membina Sejumlah SMK yang Bertaraf Internasional.

Tujuan Operasionalnya yaitu :

- Menyiapkan bahan untuk penetapan kebijakan standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal pendidikan kejuruan
- Menyiapkan bahan untuk penetapan kebijakan sistem evaluasi, sertifikasi, dan akreditasi SMK
- Mengusahakan pemenuhan kebutuhan sekolah menengah kejuruan sesuai dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan standar nasional dan internasional
- Pengembangan relevansi sekolah menengah kejuruan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan pasar kerja lokal dan global

- Mengusulkan pemenuhan jumlah, mutu, dan distribusi guru kejuruan
- Melakukan bimbingan teknis kepada SMK
- Memfasilitasi terlaksananya uji kompetensi dan sertifikasi tamatan SMK
- Meningkatkan peran serta dunia usaha dan dunia industri dalam penyelenggaraan SMK
- Melengkapi, meningkatkan, dan memelihara sarana dan prasarana SMK
- Meningkatkan sistem manajemen mutu di SMK
- Meningkatkan kreativitas dan inovasi di lingkungan SMK
- Meningkatkan SMK sebagai *learning organisation*
- Mengembangkan SMK sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- Mengembangkan kewirausahaan di lingkungan SMK
- Meningkatkan unit produksi di SMK
- Meningkatkan kerja sama internasional
- Memfasilitasi penyusunan kurikulum SMK bertaraf internasional

3) Tujuan III : Meningkatkan Manajemen SMK dengan Menerapkan Prinsip *Good Governance*.

Tujuan Operasionalnya yaitu :

- Meningkatkan *capacity building* pada semua lini organisasi
- Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (*EMIS*)
- Membangun *brand image* dalam meningkatkan citra lembaga
- Membangun koordinasi, kolaborasi, sinergi, dan *networking*
- Mengupayakan penerapan secara konsisten Sistem Manajemen Mutu

- Mengembangkan sistem kontrol kegiatan dan keuangan melalui monitoring dan evaluasi kinerja (*performance audit*) secara terprogram dan berkelanjutan
- Mengembangkan sistem penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada skala prioritas
- Meningkatkan terlaksananya manajemen berbasis sekolah yang akuntabel, transparan, dan responsif
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan dan penyelenggaraan SMK

3.3 Strategi dan Rencana Kerja Direktorat Pembinaan SMK

Strategi dan Rencana Kerja Dit.Pembinaan SMK ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu dan terjangkau bagi semua penduduk, laki-laki dan perempuan, melalui pendidikan formal yaitu SMK. Program pendidikan menengah kejuruan ini didorong untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak positif pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, serta penguatan pendidikan vokasional guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk ke dunia kerja.

3.3.1 Pemerataan dan Perluasan Akses

Berbagai kegiatan berikut dilakukan dalam rangka melaksanakan program pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan melalui pembangunan USB, RKB, laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran buku nonteks pelajaran/bacaan lainnya dan sarana belajar.

Sejalan dengan itu, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang lebih merata, bermutu, serta penyediaan biaya operasional pendidikan dan beasiswa kepada anak yang kurang beruntung tetapi berprestasi, juga akan dilakukan untuk mendukung perluasan.

Untuk daerah yang mampu mencapai APM SMP di atas 95% dan bermutu, pemerintah mendorong daerah tersebut untuk proaktif melakukan inisiasi program dan fasilitasi pendidikan universal 12 tahun dalam rangka memperluas partisipasi pendidikan menengah.

Pengembangan model layanan alternatif pendidikan akan dilakukan khusus untuk daerah terpencil, daerah pedalaman, dan daerah tertinggal sebagai fasilitas untuk menampung lulusan SMP di daerah tersebut. Perluasan penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang dilaksanakan, yaitu SMK kelas jauh di pesantren/institusi lain, SMK di daerah perbatasan, dan SMK berasrama.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja menengah di sektor manufaktur, industri pengolahan, konstruksi, pertambangan, perdagangan, jasa kemasyarakatan, pariwisata, TIK, pertanian, serta teknologi dan seni (konservatori budaya) pemerintah akan meningkatkan jumlah peserta didik SMK, yang diproyeksikan akan meningkat secara signifikan sampai dengan tahun 2009.

3.3.2 Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing

Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pada jenjang pendidikan menengah akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

Dit.PSMK mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi, bahan ajar, model pembelajaran, dan sistem evaluasi/penilaian menuju standar nasional dan internasional. Semua bagian dari sistem dan muatan pembelajaran dikembangkan untuk mencapai pembelajaran yang

bermakna dan efektif. Pada jenjang pendidikan menengah, penekanan muatan kecakapan dasar (*basic learning contents*) mendapat porsi yang menurun, sedangkan muatan akademik dan keterampilan hidup meningkat.

Dalam rangka meningkatkan mutu buku pendidikan, Dit.PSMK akan mengembangkan buku pendidikan yang bermutu dengan melakukan peningkatan sistem penilaian perbukuan.

Dalam rangka pendidikan kecakapan hidup, Dit.PSMK akan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung tumbuhnya pribadi siswa, yang berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, beretika, serta memiliki apresiasi terhadap estetika dan lingkungan hidup.

Guna mendorong siswa berprestasi, pemerintah juga akan melaksanakan program pembinaan dan fasilitasi untuk mempersiapkan anak-anak yang berprestasi istimewa mengikuti kompetisi tingkat nasional/internasional seperti olimpiade sains dan matematika bagi siswa SMA, sedangkan bagi siswa SMK berprestasi mengikuti promosi keterampilan siswa (PKS) tingkat nasional, *Asian Skill Competition* (ASC) tingkat regional dan *World Skill Competition* (WSC) tingkat internasional.

Terkait dengan peningkatan mutu juga perlu dilakukan perbaikan kondisi ruang belajar. Berdasarkan data tahun 2003, jumlah ruang belajar yang rusak ringan sekitar 4.800 ruang, serta yang rusak berat sekitar 3.000 ruang.

Dit.PSMK juga akan melakukan peningkatan jumlah SMK secara proporsional termasuk upaya penataan bidang keahlian dan program studi di SMK serta fasilitas magang agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Penataan ini dilakukan agar lulusan sekolah menengah kejuruan dapat makin memadai untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja.

Pengembangan mutu dan keunggulan SMK juga diarahkan untuk mendorong sekolah potensial menuju kategori di atas SNP. Sekolah seperti ini akan terus dikembangkan menjadi sekolah berkeunggulan nasional dan internasional.

Pengembangan sekolah berkeunggulan paling tidak satu SMK pada masing-masing kabupaten/kota menjadi sekolah berkeunggulan lokal dan internasional pada tahun 2009.

Dit.PSMK akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk pengembangan keunggulan lokal, dan dengan luar negeri dalam pengembangan kurikulum dan standar kompetensi untuk mengembangkan kompetensi lulusan agar dapat bersaing secara global. Salah satu orientasi pencapaian standar internasional adalah mendorong sekolah untuk dapat memperoleh sertifikat.

Pengembangan mutu dan keunggulan SMK juga disertai dengan program peningkatan kualitas jasmani dan pengembangan sekolah sehat. Dengan demikian, dapat tercipta siswa yang sehat dan bugar, serta sekolah yang memenuhi standar sekolah sehat.

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah kejuruan dilakukan dengan mengembangkan program studi/jurusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, antara lain teknologi pengolahan dan pengemasan makanan teknologi otomotif modern, telematika, hotel dan restoran, bidang kelautan, seni etnik dan kerajinan industri manufaktur, serta teknologi pertanian nilai tinggi. SMK di setiap daerah juga didorong untuk mengembangkan program studi yang berorientasi pada keunggulan lokal, baik pada aspek keterampilan maupun kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan akan diberikan untuk membekali lulusan SMK mampu mengembangkan sendiri lapangan kerja bagi dirinya. Pengembangan kecakapan berwirausaha akan dilakukan seluas-luasnya untuk mendorong tumbuhnya wiraswastawan sebanyak-

banyaknya, yang selain menjadi wahana kemandirian berusaha bagi pelaku-pelakunya, juga memberikan dampak makro yang sangat positif bagi pengembangan ekonomi nasional.

3.3.3 Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik

Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan daya saing dilakukan dalam kerangka sistem dan mekanisme yang sama dalam isu-isu partisipasi masyarakat, pengembangan kapasitas, dan pengembangan EMIS. Perluasan partisipasi masyarakat akan didorong lebih luas dengan melibatkan dunia usaha dan industri dalam pengelolaan pendidikan kejuruan. Mengingat pendidikan menengah kejuruan belum menjadi program wajib belajar, partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan akan diupayakan, baik dalam rangka perluasan maupun peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu, kemampuan dan kemauan untuk melakukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, sangat strategis untuk memberikan citra kelembagaan yang positif, yang selanjutnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pengelola. Masyarakat juga diharapkan untuk proaktif dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran penyelenggaraan pendidikan.

3.4 Manajemen dan Struktur Organisasi

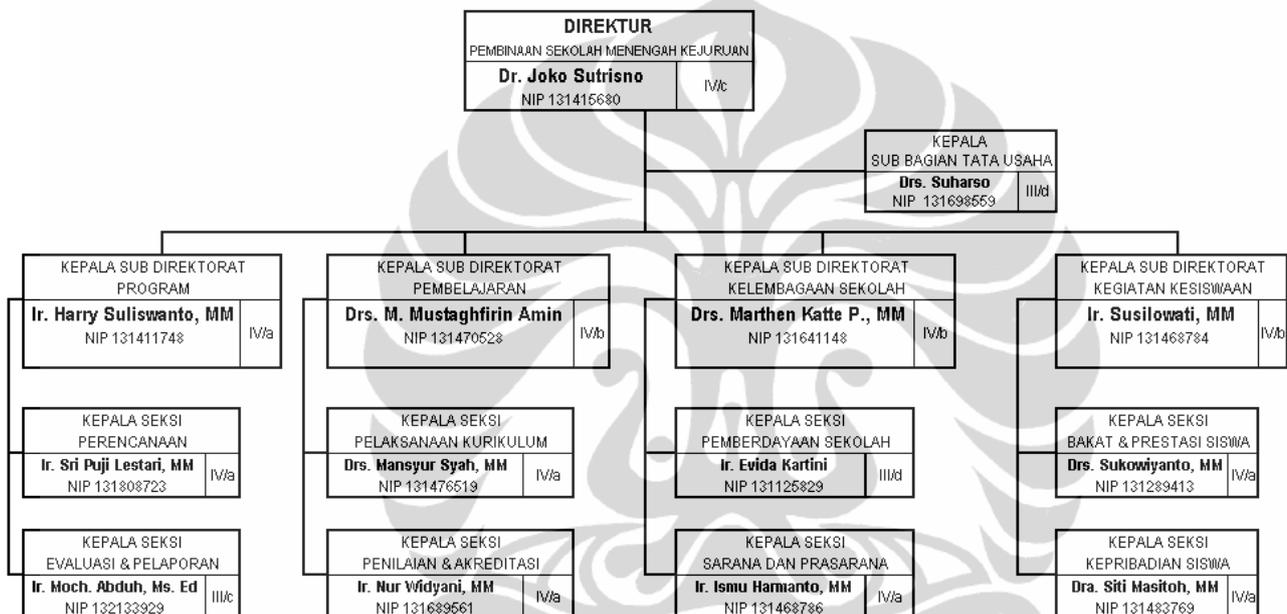
Manajemen dan struktur organisasi Direktorat Pembinaan SMK dibentuk berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah kejuruan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program;
- b. Subdirektorat Pembelajaran;

- c. Subdirektorat Kelembagaan Sekolah;
- d. Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan;
- e. Subbagian Tata Usaha,

Bagan organisasi dan manajemen Dit.PSMK tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.2
Struktur Organisasi



Sumber : Data Pegawai Keadaan Bulan Mei 2008, Direktorat Pembinaan SMK (2008)

Adapun tugas dan fungsi manajemen Dit.PSMK dijelaskan sebagai berikut :

a. Subdirektorat Program

Subdirektorat Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Direktorat serta menyiapkan bahan kerjasama di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan. Dalam melaksanakan tugasnya subdirektorat Program menyelenggarakan fungsi: persiapan data dan informasi pembinaan sekolah menengah kejuruan; penyusunan program dan kegiatan

Direktorat; penyiapan bahan kerjasama dan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan; penyiapan bahan evaluasi dan laporan Direktorat. Subdirektorat Program terdiri atas: (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data, penyajian informasi pembinaan sekolah menengah kejuruan, serta penyiapan program dan kegiatan Direktorat, (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan, serta penyusunan laporan Direktorat.

b. Subdirektorat Pembelajaran

Subdirektorat Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Dalam melaksanakan tugasnya, subdirektorat Pembelajaran menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembelajaran; penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pelaksanaan pembelajaran; pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Subdirektorat pembelajaran terdiri atas: (1) Seksi Pelaksanaan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum (2) Seksi Penilaian dan Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan akreditasi.

c. Subdirektorat Kelembagaan Sekolah

Subdirektorat Kelembagaan Sekolah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kelembagaan,

pemberdayaan sekolah, dan sarana prasarana. Dalam melaksanakan tugasnya, subdirektorat Kelembagaan Sekolah menyelenggarakan fungsi : penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan; penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang kelembagaan, pemberdayaan, dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan; pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang kelembagaan, pemberdayaan dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan. Subdirektorat Kelembagaan Sekolah terdiri atas: (1) Seksi Pemberdayaan Sekolah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pemberdayaan sekolah menengah kejuruan. (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi sarana dan prasarana sekolah menengah kejuruan.

d. Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan

Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan kesiswaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kegiatan kesiswaan; penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur kegiatan kesiswaan; pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan kesiswaan. Subdit Kegiatan Kesiswaan terdiri atas: (1) Seksi Bakat dan Prestasi Siswa melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pembinaan bakat dan pengembangan prestasi siswa, (2) Seksi Kepribadian Siswa mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pembinaan kepribadian.

e. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan ketumahtanggaan Direktorat.

3.5 Penerapan *Internal Controls* Secara Keseluruhan

Sistem pengendalian internal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja Dit.PSMK. Sistem ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Depdiknas 2005-2009 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan dan/atau program pendidikan menengah kejuruan.

Pelaksanaan pengendalian internal secara administrasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut (1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; (2) pelaksanaan dilakukan secara objektif; (3) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan penegndalian internal agar hasilnya sah dan terandal; (4) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan), sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan hasilnya dapat dilaporkan kepada melalui berbagai cara; (5) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); (6) pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel); (7) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi (komprehensif); (8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; (9) dilaksanakan secara

berkala dan berkelanjutan; (10) berbasis indikator kinerja, yaitu kriteria/indikator yang dikembangkan berdasarkan tiga tema kebijakan Depdiknas; dan (11) efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

Pengendalian administratif yang dilakukan Dit.PSMK menganut *Organizing for business excellence* (Orbex) mengarahkan para pemimpin dalam membentuk (*shape*), menyelaraskan (*align*), dan menyetel (*attune*) eksistensi organisasi. Pemaknaan yang sama atas visi, misi, nilai-nilai, strategi, gaya, infrastruktur, dan hasil menjadi pemersatu dan pemberi semangat bagi semua orang yang terlibat. Perhatian dan langkah-tindak mereka dapat diarahkan, dipantau, dan dievaluasi secara sistematis, periodik maupun spesifik.

Evaluasi hasil menunjukkan perlunya dilakukan salah satu dari tiga jenis transformasi retooling, revitalisasi atau *redirection*. *Retooling* dilakukan ketika penelaahan terhadap hasil yang dicapai organisasi menemukan bahwa infrastruktur dan gaya kepemimpinan menjadi kunci utama.

Revitalisasi dilakukan apabila strategi dan tata nilai organisasi perlu untuk ditinjau ulang agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. *Redirection* hanya dilakukan apabila dianggap keberadaan organisasi perlu dikaji lebih lanjut. Ketiga tahapan ini merupakan tingkatan dalam melakukan organisasi. Skema sistematis pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dapat dilihat dalam bagan paradigma sistematis pengelolaan organisasi di bawah ini.

Gambar 3.3
Bagan Paradigma Sistematis Pengelolaan Organisasi



Sumber : Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005 – 2009, Depdiknas, 2005.

Pengendalian internal secara Akuntansi dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 649/A.A3/KU/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Ditjen Mandikdasmen Depdiknas tahun 2008. Dalam surat keputusan tersebut disebutkan bahwa Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan terdiri dari Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Penanggungjawab Kegiatan dan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK).

Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan melaksanakan kegiatan sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Kantor/Satuan Kerja yang menjadi tanggungjawabnya melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan anggaran dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran.

Pejabat Pembuat Komitemen mempunyai tugas membuat keputusan dan atau mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atas beban APBN, melaksanakan kegiatan terkait dengan substansi tugas dan fungsi serta membuat komitmen atas nama Kuasa pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Kerja Lembur, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Keputusan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Direktorat Pembinaan SMK.

Bendahara pengeluaran bertugas menerima, menyimpan, membayar uang atau surat berharga, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang negara yang ada dalam penguasaannya, sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dan pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004.

Penanggungjawab Kegiatan, bertanggungjawab kepada Direktur, mengkoordinasikan kegiatan pada subdit masing-masing dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK), bertanggungjawab kepada Kepala Subdit /Penanggungjawab Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran dalam hal membuat pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.